

ABSTRAK

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe di Kelurahan bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

NAMA : ELSI FEBIANI
NIM : 1810090811029

Pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dengan memberi daya kepada masyarakat yang tidak berdaya dan dapat mengembangkan daya yang sudah dimiliki agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Berdasarkan obsevasi penulis menemukan gejala masalah yaitu: Tidak adanya adanya Peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat seperti kurangnya pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dalam pengembangan usaha tahu tempe dan toge dan tidak adanya Peran Pemerintah Kelurahan dalam mengembangkan sistem sarana pemasaran hasil usaha produk tahu tempe dan toge di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe dan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe di Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Teori yang digunakan adalah Menurut Arif (Muh Nurdin, dkk, 2014:69) peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu: Peran Pemerintah sebagai regulator , Peran Pemerintah sebagai Dinamisator , Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dan Peran Pemerintah sebagai Katalisator.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai sebanyak 10 orang dan usahawan tahu tempe di Kelurahan Bukit Batrem sebanyak 46 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Sampling Jenuh*. Jenis data dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Angket dan Wawancara. Dan analisa data menggunakan penganalisaan *Statistik Deskriptif* dan pengukuran data Skala *Likert*.

Hasil penelitian berada pada kategori Cukup Baik dengan skor 1422. Faktor pendukung yang didapat adalah peran pemerintah sebagai regulator, kemudian faktor pendukung yang kedua yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator . Sedangkan faktor penghambat yang didapat yaitu masih rendahnya peran pemerintah sebagai dinamisator , kemudian faktor penghambat yang kedua adalah masih rendahnya peran pemerintah sebagai katalisator.